

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1897).

Strong, CF, *Modern Political Constitutions*, (United Kingdom: Sidgwick & Jackson, 1930).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983).

Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).

Surbakti R, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999).

Faturochman, *Dinamika Psikologi dan Sosial Kepercayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Pengembangan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2002).

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni Bandung, 2002).

Cholid Nurboko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, 2002).
Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: FH UII Press, Yogyakarta, 2003).

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Persada, 2010).

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia. Studi perbandingan intervensi pejabat politik terhadap pejabat birokrasi di Indonesia dan Malaysia*. Cetakan Ket-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

M.Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011).

Yamagishi T, *Trust: the evolutionary game of mind and society*, (Tokyo: Springer, 2011).

Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Larmour P. *Interpreting Corruption: Culture and Politics in the Pacific Islands*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2012).

Soesatyo, Bambang, *Presiden dalam pusaran politik sengkuni*, (Jakarta: RMBOOKS, 2013).

Adi I.R, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

F, Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Paul Manuel, *Checks and Balances? How a Parliamentary System Could Change American Politics*, (United Kingdom: Routledge, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 39 tahun 1999 tentang HAM.

TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Undang-Undang No 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintahan No. 47 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009

Jurnal

Jose Antonio Cheibub. “Minority Government, Deadlock Situations, and the Survival of the Presidential Democracies, Sage Journal. 2002.

Philp M, “Conceptualizing Political Corruption”, Hand Book, New Jersey, 2002.

Hopkins J, “The Problem with Party Finance: Theoretical Perspective on the fundings of party”, Journal of Party Politics, No. 10, 2004.

Alfred Steven and Cindy. “Government Coalition and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism”, British Journal of Political Science. Volume 34, Issue.4, Tahun 2004.

Asshidiqie, Jimly, “Parpol dan pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006.

Martini, Rina, “Politisasi Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Politika. Volume I, Nomor 1, Tahun 2010

Abdul Hamid, “Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006”, Jurnal Administrasi Negara, Volume 11, 2011.

Azhari, “Politik dan Birokrasi di Negara Bagian Sabah Malaysia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 4, 2011.

Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1, Januari, 2012.

Handrix Chris Haryanto,” Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik?”, Jurnal Psikologi, Volume 42, Nomor.3, Tahun 2015

MOZA, Dela Fudika, “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 1, Februari 2016.

HANTORO, Novianto.M, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Negara Hukum Volume 7, Nomor 2, November 2016.

Mikael Loi, “Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK”, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5, Nomor 1, 2016.

Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan menurut Undang-Undang TIPIKOR Studi Kasus Putusan Pengadilan TIPIKOR Semarang SMG No.123/PIDSUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG.”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Sa’adah, Nabitatus, “Persoalan yang Tersisa dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945”. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, Nomor 3, Tahun 2019.

Ristyawati, Aprista, “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi”. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2, Issue 4, 2019

Skripsi/Disertasi/Orasi Ilmiah

Firdaus, *Implikasi Sistem Kepartaian dalam Stabilitas Pemerintahan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Bandung, 2012).

Abbas, Muhhamad Farhat, *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Prinsip Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Bandung, 2013).

SANDHI, Krisnanda Maya, *Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Yogyakarta: 2018).

Orasi Ilmiah Lili Romli, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, LIPI, (Jakarta, 2017).

Makalah

Philippe Nonet and Philip Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, (Jakarta, 2001).

Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum Dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Policy Paper Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180124101806-32271177/standar-ganda-politik-jokowi-di-balik-rangkap-jabatan-menteri> diakses pada 2 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a656cd14d05a/menteri-rangkap-jabatan-pimpinan-parpol-begini-hukumnya> diakses pada 2 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/syamsuddinradjab/5a526323caf7db2ddb76c0e2/melanggarkah-menteri-rangkap-jabatan> diakses pada 2 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/06/15110111/adakah-aturan-yang-melarang-menteri-rangkap-jabatan> diakses pada 2 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/2122230/jokowi-menteri-tak-boleh-rangkap-jabatan> diakses pada 2 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116214140-32-466123/pengamat-pertanyakan-yasonna-di-konpers-pdip-soal-ott-kpk> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 Pukul 22.00 WIB.

<https://tirto.id/ombudsman-khawatir-sikap-yasonna-ganggu-proses-hukum-harun-masiku-euhn>

diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 22:00 WIB

<https://tirto.id/plin-plan-yasonna-imigrasi-soal-lokasi-harun-masiku-persulit-kpk-euil>

diakses di Semarang pada 24 Februari 2020 Pukul 22:00 WIB

<https://smartgeneration.wordpress.com/2010/12/14/partai-politik-dan-regenerasi-kepemimpinan-di-indonesia/>

diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 22:00 WIB

<http://www.businessdictionary.com/definition/conflict-of-interest.html>. Lihat

juga 5 Steps To Manage Conflict of Interest Scenarios, dalam:

<http://www.latinbusinesstoday.com/productivity/leadership/2012/12/5-steps-manageconflict-interest-scenarios>

diakses pada 24 Februari 2020 Pukul 22:00 WIB

<http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=468065099084000017005000101000120074002033009058089053073090100071090005069070121090056119012045118056006022031018064024126113050004033058059080030031086112073071085059080122024119101023018089004109109112107111004004093086118103065013076104005029029&EXT=pdf>

diakses pada 25 Februari 2020 Pukul 15:43

<http://www.ginareinhardt.com/wpcontent/uploads/2012/01/ChangChuCorruption-and-Trust.pdf>

diakses pada 25 Februari 2020 Pukul 15:48

<http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/contribution/152dymek.pdf>

diakses pada 25 Februari 2020 Pukul 15:52

Skala Survei Indonesia, “Hasil Nasional tentang Kinerja Partai Politik dan Anggota Legislatif”, Oktober 2012.

Ahmad Faiz, “Survei: Partai Politik Tak Dipercaya Publik,” Koran Tempo, 23 Maret 2017

http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkadaberpotensi-jadi-tersangka?sub_slug=video diakses pada 25 Februari 2020 pukul 16:12

<https://news.okezone.com/read/2019/03/15/337/2030483/selain-ketum-ppp-romi-ini-4-pemimpin-parpol-yang-pernah-ditindak-kpk-karena-korupsi> diakses pada 25 Februari 2020 Pukul 16:15

Berita dalam Surat Kabar

Ahmad Faiz, “Survei: Partai Politik Tak Dipercaya Publik,” Koran Tempo, 23 Maret 2017

Hasil Wawancara

Sera, Mardani Ali. *Wawancara*, Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: 14 Januari, 2020).

Malik, Saputra. *Wawancara*, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Khusus

Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta: 17 Januari, 2020).

Ramadhanil, Fadli. *Wawancara*, Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, (Jakarta: 20 Januari, 2020).

Faisal Djabbar dan Bariroh Barid. *Wawancara*, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Jakarta: 23 Januari, 2020).

Supeno, Bambang Joyo. *Wawancara*. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Tengah (Semarang: 31 Januari, 2020).

Jajak Pendapat/Kuisisioner oleh Penulis

Jajak Pendapat/Kuisisioner melalui Goggle Form dengan judul Peneletian Respon Masyarakat terhadap Dualisme Menteri, 2020.